

## Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura

La Ode Abdul Wahab

Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

### ARTICLE INFO

#### Riwayat Artikel:

Diterima 28 Juli 2022

Disetujui 30 Juli 2022

#### Keywords:

Evaluasi Kinerja  
Kemampuan Keuangan Daerah  
Pendapatan Asli daerah  
Desentralisasi Fiskal  
Rasio Kemandirian  
Rasio Efektivitas  
Pertumbuhan PAD  
Kemampuan Keuangan

### ABSTRAK

**Abstract :** This research is a quantitative study, with time series data, namely data on the realization of Jayapura City Regional Income and Expenditures for the 2010-2019 Period. The results of this study indicate that in 2010-2019 the average regional independence ratio of Jayapura City is 18.71%, this value is included in the less criteria. The level of regional financial dependence of Jayapura City in 2010-2019 was an average of 38.34%, this value was included in the sufficient criteria. The results of the analysis regarding the level of fiscal decentralization of the Jayapura City government in 2010-2019 were an average of 12.54%, this value was included in the less category. The ratio of the effectiveness of the Jayapura City government's local revenue in 2010-2019 is an average of 106.40% and is included in the very effective criteria. The results of the share analysis in this case the contribution of local revenue to the total expenditure of Jayapura City above, the average share value during the 2010-2019 fiscal year period is 13.63% and is in the low category. While the results of the growth analysis analysis in this case the growth of Jayapura City's local revenue during the 2010-2019 fiscal year period is 21.25% and is in the low category. The results of the calculation of the Jayapura City financial capability index scale. the 2010-2019 fiscal year shows a figure of 0.4312 or 43.12%, this value is included in the sufficient category.

**Abstrak :** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data time series, yaitu data realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Periode 2010-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2019 rata-rata rasio kemandirian daerah Kota Jayapura adalah sebesar 18,71%, nilai ini masuk dalam kriteria kurang. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 38,34%, nilai tersebut masuk dalam kriteria cukup. Hasil analisis mengenai tingkat desentralisasi fiskal pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 12,54%, nilai tersebut masuk dalam kategori kurang. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 106,40% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil analisis share dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja Kota Jayapura di atas, rata-rata nilai share selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 13,63% dan masuk dalam kategori rendah. Sedangkan hasil analisis analisis growth dalam hal ini pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 21,25% dan masuk dalam kategori rendah. Hasil perhitungan skala indeks kemampuan keuangan Kota Jayapura. tahun anggaran 2010-2019 menunjukkan angka 0,4312 atau 43,12%, nilai ini masuk dalam kategori cukup.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



#### Alamat Korespondensi :

La Ode Abdul Wahab,  
Manajemen,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura  
Jl. Beringin Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura - Papua  
E-Mail : [ondes.kukure@gmail.com](mailto:ondes.kukure@gmail.com)

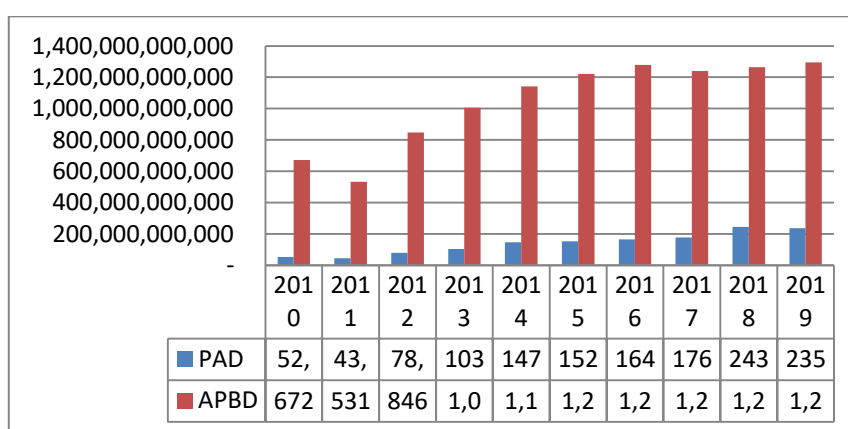
## PENDAHULUAN

Kota Jayapura sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Papua yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintahan dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua (Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua). Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus mengharuskan pemerintah daerah Kota Jayapura untuk menentukan prioritas program dan perencanaan pembangunan daerah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura telah berusaha menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerahnya.

Gambar 1

Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, 2022

Dengan kecenderungan kenaikan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahunnya, diharapkan kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura menjadi semakin lebih baik dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2011 dan 2019 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi daerah. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## 2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Widodo dalam Halim (2002 : 126) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

### b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah , yang diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

### c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

### d. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## 3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut perlu dilakukan agar mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi dari masing-masing daerah. Anggaran biaya yang lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemampuan keuangan suatu daerah merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Kemampuan daerah ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Analisis kemampuan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat diukur melalui:

### a. Perhitungan *Share* dan *Growth*

Diawali dengan perhitungan dan analisis kinerja pendapatan asli daerah melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.

### b. Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah

Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Adanya kondisi tersebut, diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk membuat peta kemampuan digunakan sejumlah parameter. *Share* merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *growth* merupakan angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun sebelumnya. *Share* dan *growth* dikatakan “tinggi” apabila memiliki nilai  $\geq 1$ ,

namun juga dikatakan “rendah” apabila *share* dan *growth* memiliki nilai  $< 1$ . Parameter tersebut kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran.

### c. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indek Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), Indeks elastisitas dan indeks *share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. (Bappenas, 2003)

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pada studi kasus terhadap evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura. Setelah itu, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk menyimpulkan dan menganalisis hasil penelitian yang diperoleh. Menurut Afrizal (2015), statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar dari data hasil penelitian, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menyimpulkan sesuatu melebihi apa yang ditunjukkan data itu sendiri.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary date*). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Umumnya data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran Kota Jayapura periode 2010-2019.

### 3. Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Kinerja Keuangan

##### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Tabel 1

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010)

##### b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tanpa Subsidi}}$$

Tabel 2

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010)

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Tabel 3

Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal

Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah	Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010)

d. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}}$$

Tabel 4

Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektivitas
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010)

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) (Bappenas, 2003). Untuk menentukan IKK dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Analisis *Share* dan *Growth*

Adapun rumus *share* dan *growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$Growth\ PAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

## b. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Metode indek kemampuan keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growts*), indeks elastisitas dan indeks share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.

$$Index\ X = \frac{\text{nilai x hasil pengukura} - \text{nilai x minimum}}{\text{nilai x maksimum} - \text{nilai x minimum}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan indek kemampuan keuangan dapat ditulis sebagai begai berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

XG = Indeks *growth*

XE = Indeks Elastisitas

XS = Indeks *Share*

Tabel 5  
Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

Tabel 6  
Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

		GROWTH (%)			
S	H	KUADRAN II	KUADRAN I	S	H
		Share : Rendah	Share : Tinggi		
A	R	Growth : Tinggi	Growth : Tinggi	E	R
		E	A		
Growth : Rendah	Growth : Rendah			S	H
		GROWTH (%)			

Sumber : Bappenas, 2003

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura

Tabel 7  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2010	52.698.546.054	459.865.970.078	11,46
2011	43.039.239.217	372.981.460.050	11,54
2012	78.138.312.941	606.046.471.499	12,89
2013	103.430.111.932	699.475.449.839	14,79
2014	147.103.021.595	737.570.461.876	19,94
2015	152.631.134.983	768.457.813.884	19,86
2016	164.831.615.678	885.350.527.422	18,62
2017	176.666.250.173	820.462.416.712	21,53
2018	243.863.618.164	836.292.757.020	29,16
2019	235.147.029.262	859.654.061.175	27,35
Rata-Rata			18,71

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil hitungan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 18,71%, dimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura tertinggi

diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 29,16% sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,46%.

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jayapura

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yang diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Penerimaan APBD Tanpa Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)
2010	52.698.546.054	212.506.401.909	24,80
2011	43.039.239.217	158.809.151.035	27,10
2012	78.138.312.941	240.942.583.027	32,43
2013	103.430.111.932	305.996.816.577	33,80
2014	147.103.021.595	403.563.821.235	36,45
2015	152.631.134.983	451.862.524.711	33,78
2016	164.831.615.678	393.378.813.035	41,90
2017	176.666.250.173	418.589.266.670	42,21
2018	243.863.618.164	427.967.574.051	56,98
2019	235.147.029.262	435.467.273.635	54,00
Rata-Rata			38,34

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil hitungan rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah pada tabel di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 38,34%, dimana tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 56,98% sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 24,80%.

## 3) Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat desentralisasi fiskal Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Penerimaan APBD Tanpa Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)
2010	52.698.546.054	672.372.371.987	7,84
2011	43.039.239.217	531.790.611.085	8,09
2012	78.138.312.941	846.989.054.526	9,23
2013	103.430.111.932	1.005.472.266.416	10,29
2014	147.103.021.595	1.141.134.283.111	12,89
2015	152.631.134.983	1.220.320.338.595	12,51
2016	164.831.615.678	1.278.729.340.457	12,89
2017	176.666.250.173	1.239.051.683.382	14,26
2018	243.863.618.164	1.264.260.331.071	19,29
2019	235.147.029.262	1.295.121.334.810	18,16
Rata-Rata			12,54

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil hitungan rasio desentralisasi fiskal pada tabel di atas, rata-rata desentralisasi fiskal Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 12,54%, dimana rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu

sebesar 19,29% sedangkan rasio desentralisasi fiskal terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,84%.

#### 4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10  
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Efektivitas PAD (%)
2010	50.576.969.893	50.500.000.000	100,15
2011	61.854.199.232	59.240.000.000	104,41
2012	76.887.003.661	66.627.000.000	115,40
2013	100.225.833.150	90.000.000.000	111,36
2014	134.479.078.467	115.000.000.000	116,94
2015	147.689.835.175	141.689.244.391	104,24
2016	160.251.398.064	158.000.000.000	101,42
2017	173.932.045.602	170.247.695.314	102,16
2018	195.734.645.374	189.759.986.678	103,15
2019	210.002.868.714	200.500.000.000	104,74
Rata-Rata			106,40

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil hitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Jayapura di atas, rata-rata rasio efektivitas Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 106,40%, dimana rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2014 yaitu sebesar 116,94% sedangkan rasio terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 100,15%.

## 2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura

### 1) Analisis *Share*

*Share* merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11  
Rasio *Share* Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Share (%)
2010	52.698.546.054	639.850.519.817	8,24
2011	43.039.239.217	389.124.717.329	11,06
2012	78.138.312.941	795.461.218.498	9,82
2013	103.430.111.932	950.906.793.019	10,88
2014	147.103.021.595	1.078.500.345.242	13,64
2015	152.631.134.983	1.204.819.811.826	12,67
2016	164.831.615.678	1.280.379.079.575	12,87
2017	176.666.250.173	1.187.042.622.291	14,88
2018	243.863.618.164	1.136.467.522.886	21,46
2019	235.147.029.262	1.134.115.360.472	20,73
Rata-Rata			13,63

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil hitungan analisis *share* dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja Kota Jayapura di atas, rata-rata nilai *share* selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 13,63%, dimana nilai *share* tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 21,46% sedangkan nilai *share* terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,24%.

### 2) Analisis *Growth*



Analisis *growth* merupakan analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12

Rasio *Growth* Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Growth PAD (Rp)
2010	52.698.546.054	
2011	43.039.239.217	(18,33)
2012	78.138.312.941	81,55
2013	103.430.111.932	32,37
2014	147.103.021.595	42,22
2015	152.631.134.983	3,76
2016	164.831.615.678	7,99
2017	176.666.250.173	7,18
2018	243.863.618.164	38,04
2019	235.147.029.262	(3,57)
Rata-Rata		21,25

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil hitungan analisis *growth* dalam hal ini pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura di atas, rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 21,25%, dimana nilai pertumbuhan tertinggi diperoleh pada tahun 2012 yaitu sebesar 81,55% sedangkan nilai pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 18,33%.

### 3) Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*). Penyusunan ketiga komponen indeks tersebut harus ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi akan semakin baik (Muhibtari, 2014).

#### a. Indeks *Growth*

Perhitungan indeks *growth* memperlihatkan bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perhitungan indeks *growth* Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019, sebagai berikut:

Tabel 13

Rasio *Growth* Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PAD-Kondisi Minimal (a)	Kondisi Maksimal-Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2010	52.698.546.054	9.659.306.837	200.824.378.947	0,0481
2011	43.039.239.217	-	200.824.378.947	0,0000
2012	78.138.312.941	35.099.073.724	200.824.378.947	0,1748
2013	103.430.111.932	60.390.872.715	200.824.378.947	0,3007
2014	147.103.021.595	104.063.782.378	200.824.378.947	0,5182
2015	152.631.134.983	109.591.895.766	200.824.378.947	0,5457
2016	164.831.615.678	121.792.376.461	200.824.378.947	0,6065
2017	176.666.250.173	133.627.010.956	200.824.378.947	0,6654
2018	243.863.618.164	200.824.378.947	200.824.378.947	1,0000
2019	235.147.029.262	192.107.790.045	200.824.378.947	0,9566
Maksimal	243.863.618.164	Jumlah		4,8159
Minimal	43.039.239.217	$X_G = \frac{\text{Jumlah Indeks/n}}$		0,4816

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diketahui bahwa nilai indeks rasio *growth* Kota Jayapura tahun 2010-2019 adalah sebesar 0,4816%.

#### b. Indeks Elastisitas

Indeks elastisitas pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung bertujuan untuk melihat elastisitas atau sensitivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perhitungan indeks elastisitas Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019:

Tabel 14  
Perhitungan Nilai Elastisitas APBD Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Belanja Langsung (Rp)	Nilai (%)
2010	52.698.546.054	508.560.629.332	0,1036
2011	43.039.239.217	369.708.352.365	0,1164
2012	78.138.312.941	620.985.711.471	0,1258
2013	103.430.111.932	717.326.178.951	0,1442
2014	147.103.021.595	839.040.971.782	0,1753
2015	152.631.134.983	943.064.803.721	0,1618
2016	164.831.615.678	1.063.367.015.819	0,1550
2017	176.666.250.173	1.018.591.797.936	0,1734
2018	243.863.618.164	941.967.759.476	0,2589
2019	235.147.029.262	941.967.759.476	0,2496

Sumber: Data Diolah, 2022

Setelah mendapatkan nilai elastisitas, maka langkah selanjutnya adalah menghitung indeks elastisitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 15  
Perhitungan Indeks Elastisitas APBD Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Nilai	Nilai - Kondisi Minimal (a)	Kondisi maksimal - Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2010	0,1036	-	0,1553	-
2011	0,1164	0,0128	0,1553	0,0824
2012	0,1258	0,0222	0,1553	0,1430
2013	0,1442	0,0406	0,1553	0,2613
2014	0,1753	0,0717	0,1553	0,4618
2015	0,1618	0,0582	0,1553	0,3750
2016	0,1550	0,0514	0,1553	0,3310
2017	0,1734	0,0698	0,1553	0,4497
2018	0,2589	0,1553	0,1553	1,0000
2019	0,2496	0,1460	0,1553	0,9404
Maksimal	0,2589	Jumlah		4,0445
Minimal	0,1036	XE = Jumlah Indeks/n		0,4044

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai indeks elastisitas APBD Kota Jayapura periode 2010-2019 adalah sebesar 0,4044%.

c. Indeks *Share*

Indeks *share* Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja memperlihatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut ini adalah perhitungan indeks *share* Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019:

Tabel 16

Perhitungan Nilai *Share* Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Belanja (Rp)	Nilai (%)
2010	52.698.546.054	639.850.519.817	0,0824
2011	43.039.239.217	389.124.717.329	0,1106
2012	78.138.312.941	795.461.218.498	0,0982
2013	103.430.111.932	950.906.793.019	0,1088
2014	147.103.021.595	1.078.500.345.242	0,1364
2015	152.631.134.983	1.204.819.811.826	0,1267
2016	164.831.615.678	1.280.379.079.575	0,1287
2017	176.666.250.173	1.187.042.622.291	0,1488
2018	243.863.618.164	1.136.467.522.886	0,2146
2019	235.147.029.262	1.134.115.360.472	0,2073

Sumber: Data Diolah, 2021

Setelah mendapatkan nilai *share*, maka langkah selanjutnya adalah menghitung indeks *share* dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 17

Perhitungan Indeks *Share* Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal (a)	Kondisi maksimal - Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2010	-	0,1322	0,0000
2011	0,0282	0,1322	0,2136
2012	0,0159	0,1322	0,1200
2013	0,0264	0,1322	0,1997
2014	0,0540	0,1322	0,4087
2015	0,0443	0,1322	0,3352
2016	0,0464	0,1322	0,3507
2017	0,0665	0,1322	0,5027
2018	0,1322	0,1322	1,0000
2019	0,1250	0,1322	0,9452
Maksimal	0,2146	Jumlah	4,0760
Minimal	0,0824	$X_s = \text{Jumlah Indeks}/n$	0,4076

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai indeks *share* Kota Jayapura periode 2010-2019 adalah sebesar 0,4076%. Dengan demikian, untuk mengetahui besarnya indeks kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKK} &= \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \times 100\% \\
 &= \frac{0,4816 + 0,4044 + 0,4076}{3} \times 100\% \\
 &= \frac{1,2936}{3} \times 100\% \\
 &= 0,4312 = 43,12\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan skala indeks kemampuan keuangan Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019 menunjukkan angka 0,4312 atau 43,12%.

### 3. Pembahasan

#### 1) Kinerja Keuangan Daerah Kota Jayapura

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019, maka dapat dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 18

Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Variabel	Indikator	Standar	Hasil
Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian	1. Sangat Kurang 2. Kurang 3. Sedang 4. Cukup 5. Baik 6. Sangat Baik	Kurang
	Rasio Ketergantungan	1. Sangat Rendah 2. Rendah 3. Sedang 4. Cukup 5. Tinggi 6. Sangat Tinggi	Cukup
	Rasio Desentralisasi Fiskal	1. Sangat Kurang 2. Kurang 3. Sedang 4. Cukup 5. Baik 6. Sangat Baik	Kurang
	Rasio Efektivitas	1. Sangat Efektif 2. Efektif 3. Cukup Efektif 4. Kurang Efektif 5. Tidak Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata rasio kemandirian daerah adalah sebesar 18,71%, nilai ini masuk dalam kriteria kurang. Kategori kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah menjelaskan bahwa Jika tingkat kemandirian suatu daerah memiliki kategori rendah berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 38,34%, nilai tersebut masuk dalam kriteria cukup, artinya bahwa keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura belum sepenuhnya mandiri masih ketergantungan bantuan dana pada pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura sudah mulai mampu mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu terganggu dengan pemerintah pusat. Jika melihat kecenderungan tersebut, maka Pemerintah Kota Jayapura mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat desentralisasi fiskal pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 12,54%, nilai tersebut masuk dalam kategori kurang, artinya bahwa kemampuan pendapatan asli daerah sangat kecil dalam presentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan sebuah daerah dalam menjalankan pembangunan atau kemampuan pendapatan asli daerah dalam menopang kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Sedangkan jika ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 106,3% dan masuk dalam kriteria sangat efektif, artinya bahwa selama periode tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Jayapura selalu mencapai bahkan melebihi target penerimaan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas pengelolaan keuangan daerah ini perlu mendapat apresiasi dan tetap dipertahankan.

## 2) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jayapura

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel

berikut ini:

Tabel 19  
Rangkuman Hasil Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2010-2019

Variabel	Indikator	Standar	Hasil
Kemampuan Keuangan Daerah	<i>Share dan Growth</i>	1. Kuadran I 2. Kuadran II 3. Kuadran III 4. Kuadran IV	Kuadran IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah
	Peta Kemampuan Keuangan Daerah (Metode Kuadran) Indeks Kemampuan Keuangan	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Cukup

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Hasil analisis *share* dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja Kota Jayapura di atas, rata-rata nilai *share* selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 13,63% dan nilai ini masuk dalam kriteria rendah, artinya bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja daerah Kota Jayapura masih relative rendah. Sedangkan hasil analisis analisis *growth* dalam hal ini pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 21,25%, artinya bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih relatif rendah. Dengan demikian, maka kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura pada tahun anggaran 2010-2019 masuk dalam Kuadran IV, artinya bahwa kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura menunjukkan Kondisi masih relative buruk. Karena pendapatan asli daerah belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuanmen gembangkan potensi lokal, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah tiap tahunnya masih relatif rendah.

Hasil perhitungan skala indeks kemampuan keuangan Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019 menunjukkan angka 0,4312 atau 43,12%, nilai ini masuk dalam kategori cukup. Berdasarkan rasio kemandirian, Pemerintah Daerah Kota Jayapura masih tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau dapat pula dikatakan bahwa keuangan pemerintah daerah Kota Jayapura belum mandiri. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura belum mampu mandiri sesuai tujuan otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Pemerintah daerah Kota Jayapura perlu menggali potensi lokal agar Indeks Kemampuan Keuangan dapat tercapai tanpa menghilangkan fungsi otonomi daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura
  - a. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata rasio kemandirian daerah adalah sebesar 18,71%, nilai ini masuk dalam kriteria kurang
  - b. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 38,34%, nilai tersebut masuk dalam kriteria cukup
  - c. Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat desentralisasi fiscal pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 12,54%, nilai tersebut masuk dalam kategori kurang
  - d. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 106,40% dan masuk dalam kriteria sangat efektif
2. Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura
  - a. Hasil analisis *share* dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja Kota Jayapura di atas, rata-rata nilai *share* selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 13,63% dan masuk dalam kategori rendah. Sedangkan hasil analisis analisis *growth* dalam hal ini pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 21,25% dan masuk dalam kategori rendah.
  - b. Hasil perhitungan skala indeks kemampuan keuangan Kota Jayapura tahun anggaran 2010-2019 menunjukkan angka 0,4312 atau 43,12%, nilai ini masuk dalam kategori cukup

**SARAN**

1. Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi untuk mendorong komponen penerimaan daerah sisi pajak dan retribusi daerah.
2. Pemerintah Kota Jayapura mengoptimalkan keberadaan perusahaan daerah bagi daerah yang memiliki perusahaan daerah.
3. Pemerintah Kota Jayapura perlu meningkatkan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, dan insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah dan menarik investor dengan didukung oleh birokrasi yang mudah dan infrastruktur yang mendukung, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi. Pertama Salemba empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul, Halim. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi. Tiga. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama. Cetakan kedua. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bappenas, 2003. *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Bappenas TA-SRPP,. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Darminto dan Achmad Husaini. 2011. *Pengaruh Debt to Equity Ratio, Ratio On Equity, Earning Per Share, dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Brawijaya
- Husein Umar, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*, GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok Pokok Kebiaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pemangunan Tingkat Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan APBD
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Muindro Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nasir. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Malang*. Jurnal Manajemen Usahawan. Hal 42. Nomor 06
- Niken Marita Pratiwi, 2017, *Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009  
Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2013. *Analisis Efektivitas, Efesiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibversitas Diponegoro. Semarang  
Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam. Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta  
Shania Nur Chasanah, 2020, *Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang*, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173  
Sijabat, Mentari Yosephen, dkk. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Malang tahun anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2.  
Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta  
Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001  
Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010  
Ulum, Ihyaul, 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*, Graha. Ilmu, Yogyakarta  
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah  
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah  
Wajong J., 1962, *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai